



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **CHANDRA OKANTARA**
2. Jabatan : **ANALIS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN**
3. NHK : **140086**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 235.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 344.500.000

1. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, YAMAHA N-MAX SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000
4. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. MOTOR, HONDA CRF 250 RALLY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 63.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 76.650.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 16.794.874**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 672.944.874

III. HUTANG Rp. 73.592.863



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

599.352.011

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.